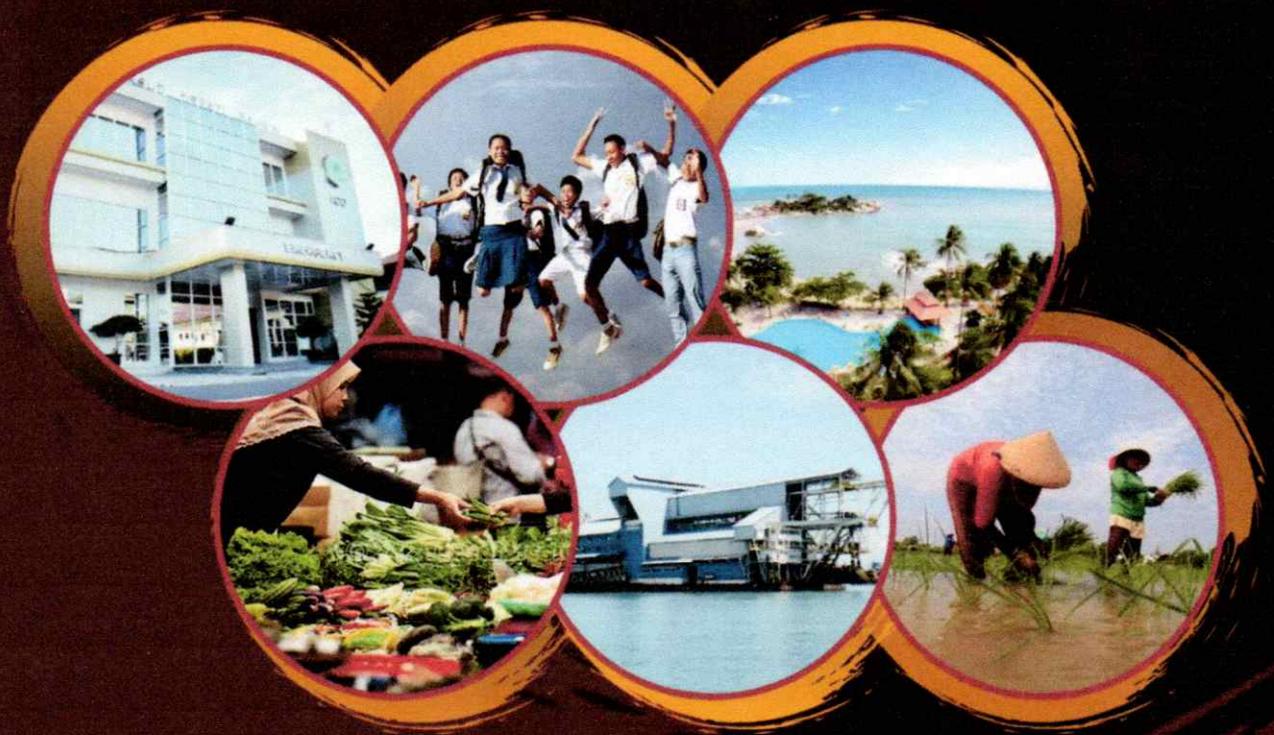




**PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA**

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021



**"PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAN
TRANSFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
MENUJU SUMBER DAYA MANUSIA
YANG BERDAYA SAING"**

**BAPPEDA KAB. BANGKA
TAHUN 2020**



No	Permasalahan UMKM Di Era COVID 19	Skenario Kebijakan Intervensi Program/Kegiatan
1	Ketidakmampuan Pembayaran Biaya Cicilan/Bunga Pinjaman Oleh UMKM	<p>Relaksasi/Restrukturisasi Angsuran Pembayaran Kredit Oleh Nasabah di Bank Sumsel Babel, Jamkrda dst</p> <p>Relaksasi (Pemotongan Atau Pemangkasan) Pajak Dan Retribusi Bagi UMKM</p> <p>Penguatan Modal melalui Skema Pembiayaan tanpa bunga dan agunan ke UMKM dan IKM</p>
2	Melemahnya Distribusi Barang/Produk UMKM Terhadap Pasar Karena Rendahnya Permintaan Pasar Dan Pemberlakuan Kerja di Rumah (<i>Work from Home</i>)	<p>Fasilitasi Pembuatan Sistem Aplikasi Belanja <i>Online</i> Melalui Mekanisme Kerjasama Dengan Pihak <i>E Commers</i></p> <p>Pemberdayaan dan Pemberian Subsidi UMKMs sebagai upaya dalam memberikan proteksi input dan proteksi output usaha</p> <p>Membangun Pola Kemitraan Dengan <i>E Commers</i></p> <p>Kebijakan Gerakan Bersama (<i>Collective Action</i>) Agar Masyarakat Mengonsumsi Produk Lokal</p>
3	Pemutusan Hubungan Kerja	<p>Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai Daerah Kepada Karyawan UMKM</p> <p><i>Workshop</i> (Pelatihan) Sistem Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Bagi Karyawan Yang Terdampak PHK Untuk Mendapatkan Pekerjaan Baru Alternatif</p> <p>Pemberian Bantuan Mendorong Jenis Usaha Baru Yang Berorientasi Pada Kebutuhan Covid 19</p> <p>Pelatihan Keterampilan Balai Latihan Kerja</p>
4	Kemampuan SDM Dibidang <i>E Commers</i> Rendah	<p>Pelatihan Penjualan <i>Online</i> Bagi Umkm</p> <p>Pelibatan Komunitas Dalam Pemberdayaan Umkm Market <i>Online</i></p>

Pemilihan Prioritas Pembangunan perekonomian yang berkualitas didukung beberapa kebijakan dan program prioritas yang mana telah dipetakan dan dikolaborasikan di beberapa perangkat daerah melalui pembahasan musrenbang RKPD tahun 2020. Berikut merupakan ilustrasi dukungan Program-program prioritas terhadap prioritas tersebut.

Tabel 4.16
Konsistensi Prioritas Pemulihan Perekonomian Yang Berkualitas



usaha harus menaikkan 'kelas' usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat. Pemerintah menyadari akan potensi UMKM tersebut, oleh sebab itu, beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah Kabupaten mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas menjadi usaha menengah. Pemberian Akses modal tanpa agunan dimaksud dilakukan melalui kerjasama dengan Bank Konvensional yang ditunjuk oleh Pemkab Bangka. Dari sisi pertanggungjawaban keuangan dan meminimalisir terjadinya kredit macet (*Non Performing Loan*) atas pinjaman daerah, baik aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dan dan efektivitas pengendalian intern maka dalam kerjasama tersebut diatur mengenai prosedur pemberian kredit sampai dengan penagihan pinjaman akan dilakukan sepenuhnya oleh pihak Bank sedangkan Pemda hanya memfasilitasi data informasi terkait status perizinan usaha, omzet, produk dan penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dan IKM.

4.5 Inovasi Daerah

Pemerintah Kabupaten Bangka memasukkan aspek penting inovasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD) tahun 2021. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat aspek perencanaan dalam arah pengembangan inovasi di berbagai bidang dalam berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangka dan nasional. Komitmen untuk memperkuat inivosi dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangka tahun 2021 di tetapkan dalam kerangka landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;